BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 akan diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK;

b. Bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi... / ii

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua..../iii

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan.../iv

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan.../v

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

36. Peraturan Menteri ...vi

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

41. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

43. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

44. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

45. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1 ...../vii

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.293.481.943.599,14 Bertambah/(Berkurang) sejumlah (Rp.66.443.801.924,74) sehingga menjadi Rp.1.227.038.141.674,40 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan;		
a. Semula	Rp1.263.481.943.599,14	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 41.755.793.691,15)	
c. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.221.726.149.907,99
2. Belanja;		
a. Semula	Rp1.293.481.943.599,14	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 66.443.801.924.74)	
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp1.227.038.141.674.40
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp5.311.991.766,41)
3. Pembiayaan Daerah;		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 31.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 25.688.008.233,59)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp5.311.991.766,41
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 1.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp5.311.991.766,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6....viii

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 22 Oktober 2020 M
5 Rabi'ul Awal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 23 Oktober 2020 M
6 Rabi'ul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 363

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untuk memperoleh persetujan bersama;

b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 14 September 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

37. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.293.481.943.599,14 berkurang sejumlah (Rp66.443.801.924,74) sehingga menjadi Rp1.227.038.141.674,40 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 1.263.481.943.599,14
   b. Bertambah/(berkurang) Rp (41.755.793.691,15)
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.221.726.149.907,99

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp 1.293.481.943.599,14
   b. Bertambah/(berkurang) Rp (66.443.801.924,74)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.227.038.141.674,40

   Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 5.311.991.766,41)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 31.000.000.000.00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp (25.688.008.233,59)
      Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.991.766,41

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 1.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00)
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00

v

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 5.311.991.766,41

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
   1) Semula Rp 89.412.809.632,14
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.228.351.375,85
   Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 110.641.161.007,99

b. Dana Perimbangan
   1) Semula Rp 744.774.622.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (87.4620.768.177,00)
   Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 657.313.853.823,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   1) Semula Rp 429.294.511.967,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 24.476.623.110,00
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 453.771.135.077,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah
   1) Semula Rp 16.086.658.524,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.688.441.375,26
   Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 18.775.099.899,26

   Perubahan Hasil Retribusi Daerah
   1) Semula Rp 1.170.887.425,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.170.887.425,00

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   1) Semula Rp 3.700.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.700.000.000,00

c. Zakat/Infaq/Sadaqah
   1) Semula Rp 7.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   1) Semula Rp 61.455.263.683,14
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.539.910.000,59
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 79.995.173.683,73

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Alokasi Umum
   1) Semula Rp 566.877.295.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (46.274.376.177,00)
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 520.602.918.823,00

b. Dana Alokasi Khusus
   1) Semula Rp 177.897.327.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (41.186.392.000,00)
   Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 136.710.935.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah
   1) Semua Rp 18.720.800.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.484.595.538,00
   Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 26.205.395.538,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 65.199.554.206,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.676.688.500,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 73.876.242.706,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp 188.911.184.000,00
   3) Bertambah/(berkurang) Rp 8.062.550.000,00)
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 196.973.734.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 156.462.973.761,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 252.789.072,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 156.715.762.833,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp 636.071.328.060,40
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.643.990.088,00)
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 629.427.337.972,40

b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp 657.410.615.538,74
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (59.799.811.836,74)
   Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 597.610.803.702,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 363.352.127.514,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.590.337.842,00)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 351.761.789.672,00

b. Belanja Hibah
   1) Semula Rp 4.749.300.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.204.207.470,00
   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.953.507.470,00

c. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula Rp 5.344.500.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.344.500.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula Rp 3.451.509.188,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 242.099.814,00
   Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 33.693.609.002,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
   1) Semula Rp 257.673.891.358,40
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.317.159.530,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 255.356.731.828,40

f. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula Rp 1.500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.817.200.000,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 7.317.200.000,00

g. Belanja Transfer Ke Pemerintah Pusat
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 44.220.784.059,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.752.834.991,00
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 55.973.619.050,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula Rp 265.599.883.534,70
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.164.235.223,70)
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 244.435.648.311,00

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 347.589.947.945,04
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (50.388.411.604,04)
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 297.201.536.341,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   1) Semula Rp 31.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (25.688.008.233,59)
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.911.766,41

b. Pengeluaran Pembiayaan
   1) Semula Rp 1.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00)
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
   1) Semula Rp 1.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00)
   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
   Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penyediaan anggaran atas pengisian jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak Tahun Anggaran 2020;

Pasal 7

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 21 Oktober 2020 M
4 Rabi'ul Awal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 22 Oktober 2020 M
5 Rabi'ul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (2/73/2020)

Lampiran Ia PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 31 TAHUN 2020
Tanggal : 22 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.263.481.943.599,14	1.221.726.149.907,99	(41.755.793.691,15)	(3,30)	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	89.412.809.632,14	110.641.161.007,99	21.228.351.375,85	23,74	
4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	16.086.658.524,00	18.775.099.899,26	2.688.441.375,26	16,71	
4.1.1.01	Pajak Hotel	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.606.446.800,00	1.851.401.900,00	(755.044.900,00)	(28,97)	
4.1.1.02.01	Restoran	2.606.446.800,00	1.851.401.900,00	(755.044.900,00)	(28,97)	
4.1.1.03	Pajak HIburan	26.328.000,00	26.328.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	15.528.000,00	15.528.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.21	Pajak Keramaian Rakyat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	566.311.207,00	1.066.311.207,00	500.000.000,00	88,29	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	566.311.207,00	1.066.311.207,00	500.000.000,00	88,29	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.475.930.000,00	4.475.930.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.475.930.000,00	4.475.930.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.083.146.355,00	7.298.796.708,26	4.215.650.353,26	136,73	
4.1.1.06.06	Koral	689.920.077,00	1.293.484.154,00	603.564.077,00	87,48	
4.1.1.06.07	Batu Pecah	587.715.241,00	2.197.801.517,26	1.610.086.276,26	273,96	
4.1.1.06.08	Kerikil	954.813.168,00	2.456.813.168,00	1.502.000.000,00	157,31	
4.1.1.06.09	Pasir Kuarsa	588.226.996,00	1.088.226.996,00	500.000.000,00	85,00	
4.1.1.06.10	Lempung/ Clay	258.845.873,00	258.845.873,00	0,00	0,00	
4.1.1.06.42	Batu Permata/ Berharga Lainnya	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	794.691.318,00	794.691.318,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	794.691.318,00	794.691.318,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2 . 03	Badan Usaha Milik Swasta	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2 . 03 . 01	Bank Aceh	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(24.688.008.233,59)	(82,29)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 31 TAHUN 2020
Tanggal : 22 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	237.535.627.705,74	232.987.121.500,00	(4.548.506.205,74)	(1,91)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	184.638.373.401,00	175.857.761.232,00	(8.780.612.169,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	184.638.373.401,00	175.857.761.232,00	(8.780.612.169,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	184.638.373.401,00	175.857.761.232,00	(8.780.612.169,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	170.560.873.401,00	161.780.261.232,00	(8.780.612.169,00)	(5,15)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	99.293.791.860,00	93.510.081.101,00	(5.783.710.759,00)	(5,82)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.075.174.360,00	8.557.547.119,00	(517.627.241,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	160.473.810,00	151.320.750,00	(9.153.060,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional	8.537.754.540,00	8.050.780.500,00	(486.974.040,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan Fungsional Umum	552.489.490,00	520.976.750,00	(31.512.740,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.420.539,00	1.339.515,00	(81.024,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	5.400.229.044,00	5.092.212.300,00	(308.016.744,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	152.958.157,00	144.233.773,00	(8.724.384,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan BPJS Kesehatan 4%	4.036.593.739,00	3.806.355.642,00	(230.238.097,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	238.579.251,00	224.971.325,00	(13.607.926,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tunjangan Jaminan Kematian	715.739.611,00	674.915.457,00	(40.824.154,00)	(5,70)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Tunjangan Profesi Guru	38.295.476.000,00	36.529.682.000,00	(1.765.794.000,00)	(4,61)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.29	Tunjangan Khusus Guru	2.861.193.000,00	3.206.595.000,00	345.402.000,00	12,07	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.32	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	1.239.000.000,00	1.309.250.000,00	70.250.000,00	5,67	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	14.077.500.000,00	14.077.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	14.077.500.000,00	14.077.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	52.897.254.304,74	57.129.360.268,00	4.232.105.963,26	8,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.632.507.600,00	3.615.787.600,00	(1.016.720.000,00)	(21,95)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	9.720.000,00	21.000.000,00	11.280.000,00	116,05	***Lokasi Kegiatan :*** *Suka Makmue*
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.720.000,00	21.000.000,00	11.280.000,00	116,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

SUKA MAKMUE, 22 Oktober 2020

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Lampiran I **QANUN KAB. NAGAN RAYA**
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	1.263.481.943.599,14	1.221.726.149.907,99	(41.755.793.691,15)	(3,30)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	89.412.809.632,14	110.641.161.007,99	21.228.351.375,85	23,74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.086.658.524,00	18.775.099.899,26	2.688.441.375,26	16,71
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.170.887.425,00	1.170.887.425,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.455.263.683,14	79.995.173.683,73	18.539.910.000,59	30,17
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	744.774.622.000,00	657.313.853.823,00	(87.460.768.177,00)	(11,74)
1.2.1	Transfer Umum	566.877.295.000,00	520.602.918.823,00	(46.274.376.177,00)	(8,16)
1.2.2	Transfer Khusus	177.897.327.000,00	136.710.935.000,00	(41.186.392.000,00)	(23,15)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	429.294.511.967,00	453.771.135.077,00	24.476.623.110,00	5,70
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.720.800.000,00	26.205.395.538,00	7.484.595.538,00	39,98
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.199.554.206,00	73.876.242.706,00	8.676.688.500,00	13,31
1.3.4	Dana Penyesuaian	188.911.184.000,00	196.973.734.000,00	8.062.550.000,00	4,27
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.462.973.761,00	156.715.762.833,00	252.789.072,00	0,16
2	**BELANJA**	1.293.481.943.599,14	1.227.038.141.674,40	(66.443.801.924,74)	(5,14)
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	636.071.328.060,40	629.427.337.972,40	(6.643.990.088,00)	(1,04)
2.1.1	Belanja Pegawai	363.352.127.514,00	351.761.789.672,00	(11.590.337.842,00)	(3,19)
2.1.4	Belanja Hibah	4.749.300.000,00	5.953.507.470,00	1.204.207.470,00	25,36
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.344.500.000,00	5.344.500.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.451.509.188,00	3.693.609.002,00	242.099.814,00	7,01
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	257.673.891.358,40	255.356.731.828,40	(2.317.159.530,00)	(0,90)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	7.317.200.000,00	5.817.200.000,00	387,81
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	657.410.615.538,74	597.610.803.702,00	(59.799.811.836,74)	(9,10)
2.2.1	Belanja Pegawai	44.220.784.059,00	55.973.619.050,00	11.752.834.991,00	26,58
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.599.883.534,70	244.435.648.311,00	(21.164.235.223,70)	(7,97)
2.2.3	Belanja Modal	347.589.947.945,04	297.201.536.341,00	(50.388.411.604,04)	(14,50)

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.000.000.000,00)	(5.311.991.766,41)	24.688.008.233,59	(82,29)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	31.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(25.688.008.233,59)	(82,86)
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(25.688.008.233,59)	(82,86)
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(24.688.008.233,59)	(82,29)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II QANUN KAB. NAGAN RAYA
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	57.970.636.800,00	76.710.546.800,00	18.739.910.000,00	32,33	261.913.565.203,00	472.205.033.971,74	734.118.599.174,74	250.068.890.423,00	448.433.125.137,00	698.502.015.560,00	(35.616.583.614,74)	(4,85)
1.01	**Pendidikan**	0,00	0,00	0,00	0,00	187.040.726.954,00	53.884.419.647,74	240.925.146.601,74	178.190.927.149,00	57.899.562.515,00	236.090.489.664,00	(4.834.656.937,74)	(2,01)
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	184.638.373.401,00	52.897.254.304,74	237.535.627.705,74	175.857.761.232,00	57.129.360.268,00	232.987.121.500,00	(4.548.506.205,74)	(1,91)
1.01 . 1.01.02	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	572.692.058,00	209.995.000,00	782.687.058,00	545.095.382,00	156.695.000,00	701.790.382,00	(80.896.676,00)	(10,34)
1.01 . 1.01.03	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	0,00	0,00	0,00	0,00	269.127.934,00	160.334.796,00	429.462.730,00	304.127.996,00	158.621.200,00	462.749.196,00	33.286.466,00	7,75
1.01 . 1.01.04	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	407.297.912,00	255.697.547,00	662.995.459,00	387.965.667,00	199.697.547,00	587.663.214,00	(75.332.245,00)	(11,36)
1.01 . 1.01.05	Dinas Pendidikan (SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.235.649,00	279.038.000,00	1.432.273.649,00	1.095.976.872,00	253.526.000,00	1.349.502.872,00	(82.770.777,00)	(5,78)
1.01 . 4.01.07	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	(80.437.500,00)	(97,98)
1.02	**Kesehatan**	57.970.636.800,00	76.710.546.800,00	18.739.910.000,00	32,33	58.633.896.418,00	159.806.416.790,00	218.440.313.208,00	56.304.790.232,00	196.581.979.071,00	252.886.769.303,00	34.446.456.095,00	15,77
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	15.970.636.800,00	16.710.546.800,00	739.910.000,00	4,63	43.303.683.795,00	65.505.549.746,00	108.809.233.541,00	41.224.607.971,00	73.376.747.777,00	114.601.355.748,00	5.792.122.207,00	5,32
1.02 . 1.02.02	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA	42.000.000.000,00	60.000.000.000,00	18.000.000.000,00	42,86	15.330.212.623,00	94.300.867.044,00	109.631.079.667,00	15.080.182.261,00	121.870.631.294,00	136.950.813.555,00	27.319.733.888,00	24,92
1.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.750.000,00	1.008.750.000,00	1.008.750.000,00	0,00
1.02 . 1.06.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.850.000,00	325.850.000,00	325.850.000,00	0,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.209.301,00	189.131.819.408,00	194.067.028.709,00	4.707.997.023,00	135.450.102.928,00	140.158.099.951,00	(53.908.928.758,00)	(27,78)
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.209.301,00	156.043.076.984,00	160.978.286.285,00	4.707.997.023,00	109.246.200.984,00	113.954.198.007,00	(47.024.088.278,00)	(29,21)
1.03 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088.742.424,00	33.088.742.424,00	0,00	24.878.901.944,00	24.878.901.944,00	(8.209.840.480,00)	(24,81)
1.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.504.680,00	36.058.159.935,00	38.540.664.615,00	2.443.394.874,00	34.163.059.080,00	36.606.453.954,00	(1.934.210.661,00)	(5,02)
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.504.680,00	36.058.159.935,00	38.540.664.615,00	2.443.394.874,00	34.163.059.080,00	36.606.453.954,00	(1.934.210.661,00)	(5,02)
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.415.536,00	3.190.476.411,00	6.439.891.947,00	3.102.651.758,00	1.952.162.341,00	5.054.814.099,00	(1.385.077.848,00)	(21,51)
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.241.024,00	1.921.778.111,00	4.393.019.135,00	2.356.691.548,00	1.406.258.091,00	3.762.949.639,00	(630.069.496,00)	(14,34)
1.05 . 1.05.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	778.174.512,00	1.268.698.300,00	2.046.872.812,00	745.960.210,00	545.904.250,00	1.291.864.460,00	(755.008.352,00)	(36,89)
1.06	**Sosial**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.812.314,00	30.133.741.780,00	35.705.554.094,00	5.319.129.387,00	22.386.259.202,00	27.705.388.589,00	(8.000.165.505,00)	(22,41)
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.972.491,00	3.981.214.680,00	5.870.187.171,00	1.801.743.996,00	3.227.284.330,00	5.029.028.326,00	(841.158.845,00)	(14,33)
1.06 . 1.06.02	DINAS SYARIAT ISLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.912.512,00	14.788.628.700,00	16.708.541.212,00	1.834.753.344,00	11.669.429.872,00	13.504.183.216,00	(3.204.357.996,00)	(19,18)
1.06 . 1.06.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.927.311,00	6.204.093.400,00	7.967.020.711,00	1.682.632.047,00	4.110.750.000,00	5.793.382.047,00	(2.173.638.664,00)	(27,28)
1.06 . 4.01.03	SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.020.000,00	4.024.020.000,00	0,00	3.034.595.000,00	3.034.595.000,00	(989.425.000,00)	(24,59)
1.06 . 4.01.05	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095.000,00	156.095.000,00	0,00	0,00	0,00	(156.095.000,00)	(100,00)
1.06 . 4.01.09	KECAMATAN BEUTONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590.000,00	47.590.000,00	0,00	21.790.000,00	21.790.000,00	(25.800.000,00)	(54,21)
1.06 . 4.01.10	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)
1.06 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(59.000.000,00)	(100,00)
1.06 . 4.01.12	KECAMATAN SUKA MAKMUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(73.700.000,00)	(100,00)
1.06 . 4.01.13	KECAMATAN KUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(53.900.000,00)	(93,74)
1.06 . 4.01.14	KECAMATAN KUALA PESISIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	(43.000.000,00)	(69,92)
1.06 . 4.01.15	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(130.400.000,00)	(92,88)
1.06 . 4.01.16	KECAMATAN TADU RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(38.000.000,00)	(84,44)
1.06 . 4.01.17	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	278.310.000,00	278.310.000,00	(106.690.000,00)	(27,71)
1.06 . 4.01.18	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(64.000.000,00)	(92,75)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308.288.192,00	57.419.431.166,00	78.727.719.358,00	20.387.432.144,00	46.141.354.687,00	66.528.786.831,00	(12.198.932.527,00)	(15,50)

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.01	**Tenaga Kerja**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.617.676,00	2.035.304.000,00	3.244.921.676,00	1.152.181.255,00	2.003.233.000,00	3.155.414.255,00	(89.507.421,00)	(2,76)
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.617.676,00	2.035.304.000,00	3.244.921.676,00	1.152.181.255,00	2.003.233.000,00	3.155.414.255,00	(89.507.421,00)	(2,76)
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.210.000,00	283.210.000,00	0,00	108.250.550,00	108.250.550,00	(174.959.450,00)	(61,78)
2.02 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.210.000,00	283.210.000,00	0,00	108.250.550,00	108.250.550,00	(174.959.450,00)	(61,78)
2.03	**Pangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.247.000,00	3.832.247.000,00	0,00	8.592.119.000,00	8.592.119.000,00	4.759.872.000,00	124,21
2.03 . 2.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.03 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.147.000,00	351.147.000,00	0,00	632.287.000,00	632.287.000,00	281.140.000,00	80,06
2.03 . 3.04.01	DINAS PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.100.000,00	2.881.100.000,00	0,00	7.359.832.000,00	7.359.832.000,00	4.478.732.000,00	155,45
2.04	**Pertanahan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394.070,00	24.000.000,00	91.394.070,00	91.394.070,00	0,00
2.04 . 2.04.01	DINAS PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394.070,00	24.000.000,00	91.394.070,00	91.394.070,00	0,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.592.126,00	11.042.389.304,00	13.078.981.430,00	1.945.202.179,00	9.069.384.304,00	11.014.586.483,00	(2.064.394.947,00)	(15,78)
2.05 . 2.05.05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.592.126,00	11.042.389.304,00	13.078.981.430,00	1.945.202.179,00	9.069.384.304,00	11.014.586.483,00	(2.064.394.947,00)	(15,78)
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.670.777,00	2.543.497.610,00	4.413.168.387,00	1.788.610.996,00	2.043.077.610,00	3.831.688.606,00	(581.479.781,00)	(13,18)
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.670.777,00	2.386.504.610,00	4.256.175.387,00	1.788.610.996,00	1.949.784.610,00	3.738.395.606,00	(517.779.781,00)	(12,17)
2.06 . 4.01.09	KECAMATAN BEUTONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)
2.06 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)
2.06 . 4.01.15	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.025.000,00	121.025.000,00	0,00	77.575.000,00	77.575.000,00	(43.450.000,00)	(35,90)
2.06 . 4.01.16	KECAMATAN TADU RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968.000,00	9.968.000,00	0,00	9.968.000,00	9.968.000,00	0,00	0,00
2.06 . 4.01.18	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	(43,75)
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.835.622,00	3.701.989.965,00	6.632.825.587,00	2.782.873.609,00	1.867.623.500,00	4.650.497.109,00	(1.982.328.478,00)	(29,89)
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.835.622,00	3.051.765.965,00	5.982.601.587,00	2.782.873.609,00	1.623.198.500,00	4.406.072.109,00	(1.576.529.478,00)	(26,35)
2.07 . 4.01.06	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.274.000,00	227.274.000,00	0,00	61.400.000,00	61.400.000,00	(165.874.000,00)	(72,98)
2.07 . 4.01.09	KECAMATAN BEUTONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	(5.800.000,00)	(7,93)
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	14.725.000,00	14.725.000,00	(53.675.000,00)	(78,47)
2.07 . 4.01.12	KECAMATAN SUKA MAKMUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(51.900.000,00)	(100,00)
2.07 . 4.01.14	KECAMATAN KUALA PESISIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(36.000.000,00)	(64,29)
2.07 . 4.01.15	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050.000,00	82.050.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	(54.050.000,00)	(65,87)
2.07 . 4.01.16	KECAMATAN TADU RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.17	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	(19.500.000,00)	(42,86)
2.07 . 4.01.18	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(19.000.000,00)	(79,17)
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.439.000,00	5.346.439.000,00	0,00	5.284.932.000,00	5.284.932.000,00	(61.507.000,00)	(1,15)
2.08 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.439.000,00	5.346.439.000,00	0,00	5.284.932.000,00	5.284.932.000,00	(61.507.000,00)	(1,15)
2.09	**Perhubungan**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.267.583,00	6.440.196.686,00	8.377.464.269,00	1.849.416.517,00	2.633.736.186,00	4.483.152.703,00	(3.894.311.566,00)	(46,49)
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.267.583,00	6.440.196.686,00	8.377.464.269,00	1.849.416.517,00	2.633.736.186,00	4.483.152.703,00	(3.894.311.566,00)	(46,49)
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.168.064,00	2.980.796.700,00	4.650.964.764,00	1.600.002.655,00	2.410.247.200,00	4.010.249.855,00	(640.714.909,00)	(13,78)
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.168.064,00	2.980.796.700,00	4.650.964.764,00	1.600.002.655,00	2.410.247.200,00	4.010.249.855,00	(640.714.909,00)	(13,78)
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.137.293,00	4.944.194.310,00	7.652.331.603,00	2.571.756.693,00	2.440.065.130,00	5.011.821.823,00	(2.640.509.780,00)	(34,51)
2.11 . 2.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.137.293,00	4.944.194.310,00	7.652.331.603,00	2.571.756.693,00	2.440.065.130,00	5.011.821.823,00	(2.640.509.780,00)	(34,51)
2.12	**Penanaman Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.021.039,00	1.044.100.599,00	3.364.121.638,00	2.220.888.284,00	713.061.599,00	2.933.949.883,00	(430.171.755,00)	(12,79)
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.021.039,00	1.044.100.599,00	3.364.121.638,00	2.220.888.284,00	713.061.599,00	2.933.949.883,00	(430.171.755,00)	(12,79)
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.515.224,00	10.944.515.224,00	0,00	7.647.834.924,00	7.647.834.924,00	(3.296.680.300,00)	(30,12)

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.13 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.515.224,00	10.944.515.224,00	0,00	7.647.834.924,00	7.647.834.924,00	(3.296.680.300,00)	(30,12)
2.14	**Statistik**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	14.610.000,00	14.610.000,00	(1.610.000,00)	(9,93)
2.14 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	14.610.000,00	14.610.000,00	(1.610.000,00)	(9,93)
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.814.250,00	1.113.417.028,00	3.726.231.278,00	2.491.940.813,00	727.215.934,00	3.219.156.747,00	(507.074.531,00)	(13,61)
2.16 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.814.250,00	1.091.117.028,00	3.703.931.278,00	2.491.940.813,00	727.215.934,00	3.219.156.747,00	(484.774.531,00)	(13,09)
2.16 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.300.000,00)	(100,00)
2.17	**Perpustakaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.163.762,00	959.498.740,00	2.972.662.502,00	1.917.165.073,00	512.863.750,00	2.430.028.823,00	(542.633.679,00)	(18,25)
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.163.762,00	959.498.740,00	2.972.662.502,00	1.917.165.073,00	512.863.750,00	2.430.028.823,00	(542.633.679,00)	(18,25)
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.415.000,00	191.415.000,00	0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	(142.315.000,00)	(74,35)
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.415.000,00	191.415.000,00	0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	(142.315.000,00)	(74,35)
3	**Urusan Pilihan**	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601.489.933,00	32.330.193.301,00	45.931.683.234,00	12.938.719.723,00	31.535.536.273,90	44.474.255.996,00	(1.457.427.238,00)	(3,17)
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.950.473,00	8.165.896.106,00	10.826.846.579,00	2.533.419.093,00	8.182.626.411,00	10.716.045.504,00	(110.801.075,00)	(1,02)
3.01 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(43.300.000,00)	(100,00)
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.950.473,00	8.122.596.106,00	10.783.546.579,00	2.533.419.093,00	8.182.626.411,00	10.716.045.504,00	(67.501.075,00)	(0,63)
3.02	**Pariwisata**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.110.000,00	2.407.110.000,00	0,00	2.261.648.000,00	2.261.648.000,00	(145.462.000,00)	(6,04)
3.02 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.110.000,00	2.407.110.000,00	0,00	2.261.648.000,00	2.261.648.000,00	(145.462.000,00)	(6,04)
3.03	**Pertanian**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647.081.620,00	17.328.282.867,00	25.975.364.487,00	8.221.016.329,00	17.323.711.767,00	25.544.728.096,00	(430.636.391,00)	(1,66)
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647.081.620,00	11.637.467.467,00	20.284.549.087,00	8.221.016.329,00	14.076.913.367,00	22.297.929.696,00	2.013.380.609,00	9,93
3.03 . 3.04.01	DINAS PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.815.400,00	5.690.815.400,00	0,00	3.246.798.400,00	3.246.798.400,00	(2.444.017.000,00)	(42,95)
3.04	**Kehutanan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.457.840,00	1.802.477.472,00	4.095.935.312,00	2.184.284.301,00	920.560.739,00	3.104.845.040,00	(991.090.272,00)	(24,20)
3.04 . 3.04.01	DINAS PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.457.840,00	1.802.477.472,00	4.095.935.312,00	2.184.284.301,00	920.560.739,00	3.104.845.040,00	(991.090.272,00)	(24,20)
3.05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.496.160,00	1.221.496.160,00	0,00	1.255.558.660,00	1.255.558.660,00	34.062.500,00	2,79
3.05 . 4.01.03	SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.496.160,00	1.221.496.160,00	0,00	1.255.558.660,00	1.255.558.660,00	34.062.500,00	2,79
3.06	**Perdagangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.020.000,00	418.020.000,00	0,00	1.252.475.000,00	1.252.475.000,00	834.455.000,00	199,62
3.06 . 2.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.020.000,00	418.020.000,00	0,00	1.252.475.000,00	1.252.475.000,00	834.455.000,00	199,62
3.07	**Perindustrian**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.710.696,00	611.710.696,00	0,00	306.130.696,00	306.130.696,00	(305.580.000,00)	(49,95)
3.07 . 2.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.710.696,00	611.710.696,00	0,00	306.130.696,00	306.130.696,00	(305.580.000,00)	(49,95)
3.08	**Transmigrasi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.200.000,00	375.200.000,00	0,00	32.825.000,00	32.825.000,00	(342.375.000,00)	(91,25)
3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.200.000,00	375.200.000,00	0,00	32.825.000,00	32.825.000,00	(342.375.000,00)	(91,25)
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.205.511.306.799,14	1.145.015.603.107,99	(60.495.703.691,15)	(5,02)	339.247.984.732,40	95.455.957.100,00	434.703.941.832,40	346.032.295.682,40	71.500.787.605,00	417.533.083.287,40	(17.170.858.545,00)	(3,95)
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	0,00	0,00	0,00	0,00	46.450.195.239,00	61.562.905.534,00	108.013.090.773,00	44.895.137.998,00	49.075.860.739,00	93.970.998.737,00	(14.042.092.036,00)	(13,00)
4.01 . 4.01.01	DPRK NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	590.231.360,00	0,00	590.231.360,00	579.380.998,00	0,00	579.380.998,00	(10.850.362,00)	(1,84)
4.01 . 4.01.03	SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.080.579,00	26.566.356.520,00	36.949.437.099,00	9.928.405.735,00	17.270.715.700,00	27.199.121.435,00	(9.750.315.664,00)	(26,39)
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRK NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.670.982,00	13.063.165.090,00	15.590.836.072,00	2.432.396.870,00	13.020.298.500,00	15.452.695.370,00	(138.140.702,00)	(0,89)
4.01 . 4.01.05	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	469.878.444,00	781.083.000,00	1.250.961.444,00	450.089.868,00	683.923.000,00	1.134.012.868,00	(116.948.576,00)	(9,35)
4.01 . 4.01.06	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	0,00	0,00	0,00	0,00	606.061.258,00	969.142.000,00	1.575.203.258,00	579.553.257,00	766.684.000,00	1.346.237.257,00	(228.966.001,00)	(14,54)
4.01 . 4.01.07	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	569.006.626,00	575.722.000,00	1.144.728.626,00	543.512.669,00	423.390.000,00	966.902.669,00	(177.825.957,00)	(15,53)
4.01 . 4.01.08	SEKRETARIAT BAITUL MAL	0,00	0,00	0,00	0,00	534.364.234,00	8.106.456.785,00	8.640.821.019,00	520.987.746,00	7.619.389.185,00	8.140.376.931,00	(500.444.088,00)	(5,79)
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN BEUTONG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.856.824,00	526.493.159,00	3.250.349.983,00	2.592.675.955,00	403.726.459,00	2.996.402.414,00	(253.947.569,00)	(7,81)
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.016.203,00	527.365.000,00	2.460.381.203,00	1.841.345.399,00	370.926.300,00	2.212.271.699,00	(248.109.504,00)	(10,08)
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.555.390,00	624.814.828,00	2.714.370.218,00	1.990.706.083,00	443.376.945,00	2.434.083.028,00	(280.287.190,00)	(10,33)
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN SUKA MAKMUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.702.354,00	496.808.998,00	2.300.511.352,00	1.721.527.393,00	406.823.098,00	2.128.350.491,00	(172.160.861,00)	(7,48)

Printed by Sim-D

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.011.240,00	596.617.695,00	2.881.628.935,00	2.174.985.410,00	362.203.000,00	2.537.188.410,00	(344.440.525,00)	(11,95)
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN KUALA PESISIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.044.319,00	617.000.000,00	2.441.044.319,00	1.763.399.104,00	473.850.000,00	2.237.249.104,00	(203.795.215,00)	(8,35)
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.343.844,00	665.029.486,00	3.050.373.330,00	2.270.942.485,00	433.619.486,00	2.704.561.971,00	(345.811.359,00)	(11,34)
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN TADU RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.907.489,00	634.270.914,00	2.408.178.403,00	1.690.010.282,00	299.836.457,00	1.989.846.739,00	(418.331.664,00)	(17,37)
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.208.178,00	228.250.000,00	2.071.458.178,00	1.756.213.654,00	184.750.000,00	1.940.963.654,00	(130.494.524,00)	(6,30)
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	912.996.774,00	628.402.000,00	1.541.398.774,00	890.214.279,00	434.290.550,00	1.324.504.829,00	(216.893.945,00)	(14,07)
4.01 . 4.01.19	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	596.834.282,00	259.360.000,00	856.194.282,00	570.375.952,00	187.172.500,00	757.548.452,00	(98.645.830,00)	(11,52)
4.01 . 4.02.01	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.438.059,00	300.438.059,00	0,00	116.988.059,00	116.988.059,00	(183.450.000,00)	(61,06)
4.01 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.130.000,00	5.396.130.000,00	0,00	5.173.897.500,00	5.173.897.500,00	(222.232.500,00)	(4,12)
4.02	**Pengawasan**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.301.690,00	3.130.400.000,00	6.555.701.690,00	3.282.427.481,00	1.865.910.500,00	5.148.337.981,00	(1.407.363.709,00)	(21,47)
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.301.690,00	3.130.400.000,00	6.555.701.690,00	3.282.427.481,00	1.865.910.500,00	5.148.337.981,00	(1.407.363.709,00)	(21,47)
4.03	**Perencanaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.822.140,00	11.479.893.666,00	15.480.715.806,00	3.841.110.704,00	7.231.042.666,00	11.072.153.370,00	(4.408.562.436,00)	(28,48)
4.03 . 4.01.03	SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.340.000,00	649.340.000,00	0,00	197.440.000,00	197.440.000,00	(451.900.000,00)	(69,59)
4.03 . 4.01.09	KECAMATAN BEUTONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.10	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.12	KECAMATAN SUKA MAKMUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.13	KECAMATAN KUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.14	KECAMATAN KUALA PESISIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.15	KECAMATAN DARUL MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.16	KECAMATAN TADU RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.18	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	6.775.000,00	6.775.000,00	(10.075.000,00)	(59,79)
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.822.140,00	10.642.203.666,00	14.643.025.806,00	3.841.110.704,00	6.855.327.666,00	10.696.438.370,00	(3.946.587.436,00)	(26,95)
4.04	**Keuangan**	1.205.511.306.799,14	1.145.015.603.107,99	(60.495.703.691,15)	(5,02)	283.000.903.208,40	13.905.260.000,00	296.906.163.208,40	291.756.347.111,40	10.482.372.500,00	302.238.719.611,40	5.332.556.403,00	1,80
4.04 . 4.01.11	KECAMATAN SEUNAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.205.511.306.799,14	1.145.015.603.107,99	(60.495.703.691,15)	(5,02)	283.000.903.208,40	13.902.260.000,00	296.903.163.208,40	291.756.347.111,40	10.482.372.500,00	302.238.719.611,40	5.335.556.403,00	1,80
4.05	**Kepegawaian**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.772.455,00	5.377.497.900,00	7.748.270.355,00	2.257.272.388,00	2.845.601.200,00	5.102.873.588,00	(2.645.396.767,00)	(34,14)
4.05 . 4.01.03	SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.783.000,00	656.783.000,00	0,00	280.900.500,00	280.900.500,00	(375.882.500,00)	(57,23)
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.772.455,00	4.720.714.900,00	7.091.487.355,00	2.257.272.388,00	2.564.700.700,00	4.821.973.088,00	(2.269.514.267,00)	(32,00)
JUMLAH		1.263.481.943.599,14	1.221.726.149.907,99	(41.755.793.691,15)	(3,30)	636.071.328.060,40	657.410.615.538,74	1.293.481.943.599,14	629.427.337.972,40	597.610.803.702,00	1.227.038.141.674,40	(66.443.801.924,74)	(5,14)

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Printed By SimDa

Lampiran IIa QANUN KAB. NAGAN RAYA
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

NAGAN RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.01.01		**DINAS PENDIDIKAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	184.638.373.401,00	52.897.254.304,74	237.535.627.705,74	175.857.761.232,00	57.129.360.268,00	232.987.121.500,00	(4.548.506.205,74)	(1,91)
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	184.638.373.401,00	52.897.254.304,74	237.535.627.705,74	175.857.761.232,00	57.129.360.268,00	232.987.121.500,00	(4.548.506.205,74)	(1,91)
1.01.02		**Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)**	0,00	0,00	0,00	0,00	572.692.058,00	209.995.000,00	782.687.058,00	545.095.382,00	156.695.000,00	701.790.382,00	(80.896.676,00)	(10,34)
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	572.692.058,00	209.995.000,00	782.687.058,00	545.095.382,00	156.695.000,00	701.790.382,00	(80.896.676,00)	(10,34)
1.01.03		**Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)**	0,00	0,00	0,00	0,00	269.127.934,00	160.334.796,00	429.462.730,00	304.127.996,00	158.621.200,00	462.749.196,00	33.286.466,00	7,75
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	269.127.934,00	160.334.796,00	429.462.730,00	304.127.996,00	158.621.200,00	462.749.196,00	33.286.466,00	7,75
1.01.04		**Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)**	0,00	0,00	0,00	0,00	407.297.912,00	255.697.547,00	662.995.459,00	387.965.667,00	199.697.547,00	587.663.214,00	(75.332.245,00)	(11,36)
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0.00	0,00	0,00	0,00	407.297.912,00	255.697.547,00	662.995.459,00	387.965.667,00	199.697.547,00	587.663.214,00	(75.332.245,00)	(11,36)
1.01.05		**Dinas Pendidikan (SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN)**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.235.649,00	279.038.000,00	1.432.273.649,00	1.095.976.872,00	253.526.000,00	1.349.502.872,00	(82.770.777,00)	(5,78)
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.235.649,00	279.038.000,00	1.432.273.649,00	1.095.976.872,00	253.526.000,00	1.349.502.872,00	(82.770.777,00)	(5,78)
1.02.01		**DINAS KESEHATAN**	15.970.636.800,00	16.710.546.800,00	739.910.000,00	4,63	43.303.683.795,00	65.505.549.746,00	108.809.233.541,00	41.224.607.971,00	73.376.747.777,00	114.601.355.748,00	5.792.122.207,00	5,32
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	15.970.636.800,00	16.710.546.800,00	739.910.000,00	4,63	43.303.683.795,00	65.505.549.746,00	108.809.233.541,00	41.224.607.971,00	73.376.747.777,00	114.601.355.748,00	5.792.122.207,00	5,32
1.02.02		**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA**	42.000.000.000,00	60.000.000.000,00	18.000.000.000,00	42,86	15.330.212.623,00	94.300.867.044,00	109.631.079.667,00	15.080.182.261,00	121.870.631.294,00	136.950.813.555,00	27.319.733.888,00	24,92
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	42.000.000.000,00	60.000.000.000,00	18.000.000.000,00	42,86	15.330.212.623,00	94.300.867.044,00	109.631.079.667,00	15.080.182.261,00	121.870.631.294,00	136.950.813.555,00	27.319.733.888,00	24,92
1.03.01		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.209.301,00	156.043.076.984,00	160.978.286.285,00	4.707.997.023,00	109.246.200.984,00	113.954.198.007,00	(47.024.088.278,00)	(29,21)
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.209.301,00	156.043.076.984,00	160.978.286.285,00	4.707.997.023,00	109.246.200.984,00	113.954.198.007,00	(47.024.088.278,00)	(29,21)
1.04.01		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.504.680,00	69.146.902.359,00	71.629.407.039,00	2.443.394.874,00	59.041.961.024,00	61.485.355.898,00	(10.144.051.141,00)	(14,16)
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088.742.424,00	33.088.742.424,00	0,00	24.878.901.944,00	24.878.901.944,00	(8.209.840.480,00)	(24,81)
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.504.680,00	36.058.159.935,00	38.540.664.615,00	2.443.394.874,00	34.163.059.080,00	36.606.453.954,00	(1.934.210.661,00)	(5,02)
1.05.01		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.241.024,00	1.921.778.111,00	4.393.019.135,00	2.356.691.548,00	1.406.258.091,00	3.762.949.639,00	(630.069.496,00)	(14,34)
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.241.024,00	1.921.778.111,00	4.393.019.135,00	2.356.691.548,00	1.406.258.091,00	3.762.949.639,00	(630.069.496,00)	(14,34)
1.05.02		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	0,00	0,00	0,00	0,00	778.174.512,00	1.268.698.300,00	2.046.872.812,00	745.960.210,00	545.904.250,00	1.291.864.460,00	(755.008.352,00)	(36,89)
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	778.174.512,00	1.268.698.300,00	2.046.872.812,00	745.960.210,00	545.904.250,00	1.291.864.460,00	(755.008.352,00)	(36,89)
1.06.01		**DINAS SOSIAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.972.491,00	3.981.214.680,00	5.870.187.171,00	1.801.743.996,00	4.236.034.330,00	6.037.778.326,00	167.591.155,00	2,85
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.750.000,00	1.008.750.000,00	1.008.750.000,00	0,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.972.491,00	3.981.214.680,00	5.870.187.171,00	1.801.743.996,00	3.227.284.330,00	5.029.028.326,00	(841.158.845,00)	(14,33)
1.06.02		**DINAS SYARIAT ISLAM**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.912.512,00	14.788.628.700,00	16.708.541.212,00	1.834.753.344,00	11.669.429.872,00	13.504.183.216,00	(3.204.357.996,00)	(19,18)

Printed By SimDa

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.912.512,00	14.788.628.700,00	16.708.541.212,00	1.834.753.344,00	11.669.429.872,00	13.504.183.216,00	(3.204.357.996,00)	(19,18)
1.06.03		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.927.311,00	6.204.093.400,00	7.967.020.711,00	1.682.632.047,00	4.436.600.000,00	6.119.232.047,00	(1.847.788.664,00)	(23,19)
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.850.000,00	325.850.000,00	325.850.000,00	0,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.927.311,00	6.204.093.400,00	7.967.020.711,00	1.682.632.047,00	4.110.750.000,00	5.793.382.047,00	(2.173.638.664,00)	(27,28)
2.01.01		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.617.676,00	2.410.504.000,00	3.620.121.676,00	1.152.181.255,00	2.036.058.000,00	3.188.239.255,00	(431.882.421,00)	(11,93)
	2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.617.676,00	2.035.304.000,00	3.244.921.676,00	1.152.181.255,00	2.003.233.000,00	3.155.414.255,00	(89.507.421,00)	(2,76)
	3.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.200.000,00	375.200.000,00	0,00	32.825.000,00	32.825.000,00	(342.375.000,00)	(91,25)
2.04.01		**DINAS PERTANAHAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394.070,00	24.000.000,00	91.394.070,00	91.394.070,00	0,00
	2.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394.070,00	24.000.000,00	91.394.070,00	91.394.070,00	0,00
2.05.05		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.592.126,00	11.042.389.304,00	13.078.981.430,00	1.945.202.179,00	9.069.384.304,00	11.014.586.483,00	(2.064.394.947,00)	(15,78)
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.592.126,00	11.042.389.304,00	13.078.981.430,00	1.945.202.179,00	9.069.384.304,00	11.014.586.483,00	(2.064.394.947,00)	(15,78)
2.06.01		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.670.777,00	2.386.504.610,00	4.256.175.387,00	1.788.610.996,00	1.949.784.610,00	3.738.395.606,00	(517.779.781,00)	(12,17)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.670.777,00	2.386.504.610,00	4.256.175.387,00	1.788.610.996,00	1.949.784.610,00	3.738.395.606,00	(517.779.781,00)	(12,17)
2.07.01		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.835.622,00	8.681.414.965,00	11.612.250.587,00	2.782.873.609,00	7.016.381.050,00	9.799.254.659,00	(1.812.995.928,00)	(15,61)
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.210.000,00	283.210.000,00	0,00	108.250.550,00	108.250.550,00	(174.959.450,00)	(61,78)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.835.622,00	3.051.765.965,00	5.982.601.587,00	2.782.873.609,00	1.623.198.500,00	4.406.072.109,00	(1.576.529.478,00)	(26,35)
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.439.000,00	5.346.439.000,00	0,00	5.284.932.000,00	5.284.932.000,00	(61.507.000,00)	(1,15)
2.09.01		**DINAS PERHUBUNGAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.267.583,00	6.483.496.686,00	8.420.764.269,00	1.849.416.517,00	2.633.736.186,00	4.483.152.703,00	(3.937.611.566,00)	(46,76)
	2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.267.583,00	6.440.196.686,00	8.377.464.269,00	1.849.416.517,00	2.633.736.186,00	4.483.152.703,00	(3.894.311.566,00)	(46,49)
	3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(43.300.000,00)	(100,00)
2.10.01		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.168.064,00	2.980.796.700,00	4.650.964.764,00	1.600.002.655,00	2.410.247.200,00	4.010.249.855,00	(640.714.909,00)	(13,78)
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.168.064,00	2.980.796.700,00	4.650.964.764,00	1.600.002.655,00	2.410.247.200,00	4.010.249.855,00	(640.714.909,00)	(13,78)
2.11.01		**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.137.293,00	6.573.925.006,00	9.282.062.299,00	2.571.756.693,00	4.598.670.826,00	7.170.427.519,00	(2.111.634.780,00)	(22,75)
	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.137.293,00	4.944.194.310,00	7.652.331.603,00	2.571.756.693,00	2.440.065.130,00	5.011.821.823,00	(2.640.509.780,00)	(34,51)
	3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.020.000,00	418.020.000,00	0,00	1.252.475.000,00	1.252.475.000,00	834.455.000,00	199,62
	3.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.710.696,00	611.710.696,00	0,00	306.130.696,00	306.130.696,00	(305.580.000,00)	(49,95)
2.12.01		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.021.039,00	1.044.100.599,00	3.364.121.638,00	2.220.888.284,00	713.061.599,00	2.933.949.883,00	(430.171.755,00)	(12,79)
	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.021.039,00	1.044.100.599,00	3.364.121.638,00	2.220.888.284,00	713.061.599,00	2.933.949.883,00	(430.171.755,00)	(12,79)
2.16.01		**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.814.250,00	14.442.742.252,00	17.055.556.502,00	2.491.940.813,00	10.636.698.858,00	13.128.639.671,00	(3.926.916.831,00)	(23,02)
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.515.224,00	10.944.515.224,00	0,00	7.647.834.924,00	7.647.834.924,00	(3.296.680.300,00)	(30,12)

Printed By Simda

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.814.250,00	1.091.117.028,00	3.703.931.278,00	2.491.940.813,00	727.215.934,00	3.219.156.747,00	(484.774.531,00)	(13,09)
	3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.110.000,00	2.407.110.000,00	0,00	2.261.648.000,00	2.261.648.000,00	(145.462.000,00)	(6,04)
2.17.01		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.163.762,00	1.150.913.740,00	3.164.077.502,00	1.917.165.073,00	561.963.750,00	2.479.128.823,00	(684.948.679,00)	(21,65)
	2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.163.762,00	959.498.740,00	2.972.662.502,00	1.917.165.073,00	512.863.750,00	2.430.028.823,00	(542.633.679,00)	(18,25)
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.415.000,00	191.415.000,00	0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	(142.315.000,00)	(74,35)
3.01.01		**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.950.473,00	8.512.263.106,00	11.173.213.579,00	2.533.419.093,00	8.829.523.411,00	11.362.942.504,00	189.728.925,00	1,70
	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.147.000,00	351.147.000,00	0,00	632.287.000,00	632.287.000,00	281.140.000,00	80,06
	2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	14.610.000,00	14.610.000,00	(1.610.000,00)	(9,93)
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.300.000,00)	(100,00)
	3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.950.473,00	8.122.596.106,00	10.783.546.579,00	2.533.419.093,00	8.182.626.411,00	10.716.045.504,00	(67.501.075,00)	(0,63)
3.03.01		**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647.081.620,00	11.637.467.467,00	20.284.549.087,00	8.221.016.329,00	15.401.913.367,00	23.622.929.696,00	3.338.380.609,00	16,46
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	0,00
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647.081.620,00	11.637.467.467,00	20.284.549.087,00	8.221.016.329,00	14.076.913.367,00	22.297.929.696,00	2.013.380.609,00	9,93
3.04.01		**DINAS PERKEBUNAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.457.840,00	10.374.392.872,00	12.667.850.712,00	2.184.284.301,00	11.527.191.139,00	13.711.475.440,00	1.043.624.728,00	8,24
	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.100.000,00	2.881.100.000,00	0,00	7.359.832.000,00	7.359.832.000,00	4.478.732.000,00	155,45
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.815.400,00	5.690.815.400,00	0,00	3.246.798.400,00	3.246.798.400,00	(2.444.017.000,00)	(42,95)
	3.04	Urusan Pilihan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.457.840,00	1.802.477.472,00	4.095.935.312,00	2.184.284.301,00	920.560.739,00	3.104.845.040,00	(991.090.272,00)	(24,20)
4.01.01		**DPRK NAGAN RAYA**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	0,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	10.598.414.859,00	0,00	10.598.414.859,00	0,00	0,00
4.01.02		**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	590.231.360,00	0,00	590.231.360,00	579.380.998,00	0,00	579.380.998,00	(10.850.362,00)	(1,84)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	590.231.360,00	0,00	590.231.360,00	579.380.998,00	0,00	579.380.998,00	(10.850.362,00)	(1,84)
4.01.03		**SETDA KABUPATEN NAGAN RAYA**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.080.579,00	33.117.995.680,00	43.501.076.259,00	9.928.405.735,00	22.039.209.860,00	31.967.615.595,00	(11.533.460.664,00)	(26,51)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.020.000,00	4.024.020.000,00	0,00	3.034.595.000,00	3.034.595.000,00	(989.425.000,00)	(24,59)
	3.05	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.496.160,00	1.221.496.160,00	0,00	1.255.558.660,00	1.255.558.660,00	34.062.500,00	2,79
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.080.579,00	26.566.356.520,00	36.949.437.099,00	9.928.405.735,00	17.270.715.700,00	27.199.121.435,00	(9.750.315.664,00)	(26,39)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.340.000,00	649.340.000,00	0,00	197.440.000,00	197.440.000,00	(451.900.000,00)	(69,59)
	4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.783.000,00	656.783.000,00	0,00	280.900.500,00	280.900.500,00	(375.882.500,00)	(57,23)
4.01.04		**SEKRETARIAT DPRK NAGAN RAYA**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.670.982,00	13.063.165.090,00	15.590.836.072,00	2.432.396.870,00	13.020.298.500,00	15.452.695.370,00	(138.140.702,00)	(0,89)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.670.982,00	13.063.165.090,00	15.590.836.072,00	2.432.396.870,00	13.020.298.500,00	15.452.695.370,00	(138.140.702,00)	(0,89)
4.01.05		**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**	0,00	0,00	0,00	0,00	469.878.444,00	937.178.000,00	1.407.056.444,00	450.089.868,00	683.923.000,00	1.134.012.868,00	(273.043.576,00)	(19,41)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095.000,00	156.095.000,00	0,00	0,00	0,00	(156.095.000,00)	(100,00)

Printed By SimDa

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	469.878.444,00	781.083.000,00	1.250.961.444,00	450.089.868,00	683.923.000,00	1.134.012.868,00	(116.948.576,00)	(9,35)
4.01.06		**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**	0,00	0,00	0,00	0,00	606.061.258,00	1.196.416.000,00	1.802.477.258,00	579.553.257,00	828.084.000,00	1.407.637.257,00	(394.840.001,00)	(21,91)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.274.000,00	227.274.000,00	0,00	61.400.000,00	61.400.000,00	(165.874.000,00)	(72,98)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	606.061.258,00	969.142.000,00	1.575.203.258,00	579.553.257,00	766.684.000,00	1.346.237.257,00	(228.966.001,00)	(14,54)
4.01.07		**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	569.006.626,00	657.822.000,00	1.226.828.626,00	543.512.669,00	425.052.500,00	968.565.169,00	(258.263.457,00)	(21,05)
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	(80.437.500,00)	(97,98)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	569.006.626,00	575.722.000,00	1.144.728.626,00	543.512.669,00	423.390.000,00	966.902.669,00	(177.825.957,00)	(15,53)
4.01.08		**SEKRETARIAT BAITUL MAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	534.364.234,00	8.106.456.785,00	8.640.821.019,00	520.987.746,00	7.619.389.185,00	8.140.376.931,00	(500.444.088,00)	(5,79)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	534.364.234,00	8.106.456.785,00	8.640.821.019,00	520.987.746,00	7.619.389.185,00	8.140.376.931,00	(500.444.088,00)	(5,79)
4.01.09		**KECAMATAN BEUTONG**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.856.824,00	667.183.159,00	3.391.039.983,00	2.592.675.955,00	509.066.459,00	3.101.742.414,00	(289.297.569,00)	(8,53)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590.000,00	47.590.000,00	0,00	21.790.000,00	21.790.000,00	(25.800.000,00)	(54,21)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	(5.800.000,00)	(7,93)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.856.824,00	526.493.159,00	3.250.349.983,00	2.592.675.955,00	403.726.459,00	2.996.402.414,00	(253.947.569,00)	(7,81)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01.10		**KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.016.203,00	583.365.000,00	2.516.381.203,00	1.841.345.399,00	385.926.300,00	2.227.271.699,00	(289.109.504,00)	(11,49)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.016.203,00	527.365.000,00	2.460.381.203,00	1.841.345.399,00	370.926.300,00	2.212.271.699,00	(248.109.504,00)	(10,08)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01.11		**KECAMATAN SEUNAGAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.555.390,00	795.114.828,00	2.884.670.218,00	1.990.706.083,00	485.001.945,00	2.475.708.028,00	(408.962.190,00)	(14,18)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(59.000.000,00)	(100,00)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	14.725.000,00	14.725.000,00	(53.675.000,00)	(78,47)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.555.390,00	624.814.828,00	2.714.370.218,00	1.990.706.083,00	443.376.945,00	2.434.083.028,00	(280.287.190,00)	(10,33)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	0,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
4.01.12		**KECAMATAN SUKA MAKMUE**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.702.354,00	643.408.998,00	2.447.111.352,00	1.721.527.393,00	427.823.098,00	2.149.350.491,00	(297.760.861,00)	(12,17)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(73.700.000,00)	(100,00)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(51.900.000,00)	(100,00)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.702.354,00	496.808.998,00	2.300.511.352,00	1.721.527.393,00	406.823.098,00	2.128.350.491,00	(172.160.861,00)	(7,48)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01.13		**KECAMATAN KUALA**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.011.240,00	670.717.695,00	2.955.728.935,00	2.174.985.410,00	382.403.000,00	2.557.388.410,00	(398.340.525,00)	(13,48)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(53.900.000,00)	(93,74)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.011.240,00	596.617.695,00	2.881.628.935,00	2.174.985.410,00	362.203.000,00	2.537.188.410,00	(344.440.525,00)	(11,95)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00
4.01.14		**KECAMATAN KUALA PESISIR**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.044.319,00	762.500.000,00	2.586.544.319,00	1.763.399.104,00	540.350.000,00	2.303.749.104,00	(282.795.215,00)	(10,93)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	(43.000.000,00)	(69,92)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(36.000.000,00)	(64,29)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.044.319,00	617.000.000,00	2.441.044.319,00	1.763.399.104,00	473.850.000,00	2.237.249.104,00	(203.795.215,00)	(8,35)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.01.15		**KECAMATAN DARUL MAKMUR**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.343.844,00	1.027.504.486,00	3.412.848.330,00	2.270.942.485,00	568.194.486,00	2.839.136.971,00	(573.711.359,00)	(16,81)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(130.400.000,00)	(92,88)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.025.000,00	121.025.000,00	0,00	77.575.000,00	77.575.000,00	(43.450.000,00)	(35,90)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050.000,00	82.050.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	(54.050.000,00)	(65,87)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.343.844,00	665.029.486,00	3.050.373.330,00	2.270.942.485,00	433.619.486,00	2.704.561.971,00	(345.811.359,00)	(11,34)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
4.01.16		**KECAMATAN TADU RAYA**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.907.489,00	741.238.914,00	2.515.146.403,00	1.690.010.282,00	368.804.457,00	2.058.814.739,00	(456.331.664,00)	(18,14)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(38.000.000,00)	(84,44)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968.000,00	9.968.000,00	0,00	9.968.000,00	9.968.000,00	0,00	0,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.907.489,00	634.270.914,00	2.408.178.403,00	1.690.010.282,00	299.836.457,00	1.989.846.739,00	(418.331.664,00)	(17,37)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.01.17		**KECAMATAN TRIPA MAKMUR**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.208.178,00	658.750.000,00	2.501.958.178,00	1.756.213.654,00	489.060.000,00	2.245.273.654,00	(256.684.524,00)	(10,26)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	278.310.000,00	278.310.000,00	(106.690.000,00)	(27,71)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	(19.500.000,00)	(42,86)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.208.178,00	228.250.000,00	2.071.458.178,00	1.756.213.654,00	184.750.000,00	1.940.963.654,00	(130.494.524,00)	(6,30)
4.01.18		**KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG**	0,00	0,00	0,00	0,00	912.996.774,00	746.252.000,00	1.659.248.774,00	890.214.279,00	455.565.550,00	1.345.779.829,00	(313.468.945,00)	(18,89)
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(64.000.000,00)	(92,75)
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	(43,75)
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(19.000.000,00)	(79,17)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	912.996.774,00	628.402.000,00	1.541.398.774,00	890.214.279,00	434.290.550,00	1.324.504.829,00	(216.893.945,00)	(14,07)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	6.775.000,00	6.775.000,00	(10.075.000,00)	(59,79)

Printed By SimDa

KODE		URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
			Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01.19		**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN NAGAN RAYA**	0,00	0,00	0,00	0,00	596.834.282,00	259.360.000,00	856.194.282,00	570.375.952,00	187.172.500,00	757.548.452,00	(98.645.830,00)	(11,52)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	596.834.282,00	259.360.000,00	856.194.282,00	570.375.952,00	187.172.500,00	757.548.452,00	(98.645.830,00)	(11,52)
4.02.01		**INSPEKTORAT**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.301.690,00	3.430.838.059,00	6.856.139.749,00	3.282.427.481,00	1.982.898.559,00	5.265.326.040,00	(1.590.813.709,00)	(23,20)
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.438.059,00	300.438.059,00	0,00	116.988.059,00	116.988.059,00	(183.450.000,00)	(61,06)
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.301.690,00	3.130.400.000,00	6.555.701.690,00	3.282.427.481,00	1.865.910.500,00	5.148.337.981,00	(1.407.363.709,00)	(21,47)
4.03.01		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.822.140,00	10.642.203.666,00	14.643.025.806,00	3.841.110.704,00	6.855.327.666,00	10.696.438.370,00	(3.946.587.436,00)	(26,95)
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.822.140,00	10.642.203.666,00	14.643.025.806,00	3.841.110.704,00	6.855.327.666,00	10.696.438.370,00	(3.946.587.436,00)	(26,95)
4.04.01		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**	1.205.511.306.799,14	1.145.015.603.107,99	(60.495.703.691,15)	(5,02)	283.000.903.208,40	19.298.390.000,00	302.299.293.208,40	291.756.347.111,40	15.656.270.000,00	307.412.617.111,40	5.113.323.903,00	1,69
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.130.000,00	5.396.130.000,00	0,00	5.173.897.500,00	5.173.897.500,00	(222.232.500,00)	(4,12)
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	1.205.511.306.799,14	1.145.015.603.107,99	(60.495.703.691,15)	(5,02)	283.000.903.208,40	13.902.260.000,00	296.903.163.208,40	291.756.347.111,40	10.482.372.500,00	302.238.719.611,40	5.335.556.403,00	1,80
4.05.01		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.772.455,00	4.720.714.900,00	7.091.487.355,00	2.257.272.388,00	2.564.700.700,00	4.821.973.088,00	(2.269.514.267,00)	(32,00)
	4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.772.455,00	4.720.714.900,00	7.091.487.355,00	2.257.272.388,00	2.564.700.700,00	4.821.973.088,00	(2.269.514.267,00)	(32,00)
JUMLAH			1.263.481.943.599,14	1.221.726.149.907,99	(41.755.793.691,15)	(3,30)	636.071.328.060,40	657.410.615.538,74	1.293.481.943.599,14	629.427.337.972,40	597.610.803.702,00	1.227.038.141.674,40	(66.443.801.924,74)	(5,14)

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Printed By SimDa

Lampiran III QANUN KAB. NAGAN RAYA
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	237.535.627.705,74	232.987.121.500,00	(4.548.506.205,74)	(1,91)	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	184.638.373.401,00	175.857.761.232,00	(8.780.612.169,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	184.638.373.401,00	175.857.761.232,00	(8.780.612.169,00)	(4,76)	PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Tentang TKDD 2020
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	52.897.254.304,74	57.129.360.258,00	4.232.105.963,26	8,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.632.507.600,00	3.615.787.600,00	(1.016.720.000,00)	(21,95)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	9.720.000,00	21.000.000,00	11.280.000,00	116,05	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	21.000.000,00	11.280.000,00	116,05	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*	160.280.000,00	150.620.000,00	(9.660.000,00)	(6,03)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.280.000,00	150.620.000,00	(9.660.000,00)	(6,03)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	*Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	10.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00	800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00	800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	*Penyediaan Alat Tulis Kantor*	46.019.000,00	126.019.000,00	80.000.000,00	173,84	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.019.000,00	126.019.000,00	80.000.000,00	173,84	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	285.347.600,00	278.507.600,00	(6.840.000,00)	(2,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.347.600,00	278.507.600,00	(6.840.000,00)	(2,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	30.000.000,00	57.500.000,00	27.500.000,00	91,67	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	*Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	48.700.000,00	28.100.000,00	(20.600.000,00)	(42,30)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.700.000,00	28.100.000,00	(20.600.000,00)	(42,30)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	*Penyediaan Makanan Dan Minuman*	136.661.000,00	185.161.000,00	48.500.000,00	35,49	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.661.000,00	185.161.000,00	48.500.000,00	35,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.091.487.355,00)	(4.821.973.088,00)	2.269.514.267,00	(32,00)	

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Printed By Sim03

Lampiran IV QANUN KAB. NAGAN RAYA
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

NAGAN RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	20.953.511.500,00	149.100.974.239,70	302.150.548.232,04	472.205.033.971,74	36.764.016.491,00	154.776.778.809,00	256.892.329.837,00	448.433.125.137,00	(23.771.908.834,74)	(5,03)
1.01	**Pendidikan**	5.970.707.000,00	23.164.627.975,70	24.749.084.672,04	53.884.419.647,74	7.760.443.991,00	24.004.881.445,00	26.134.237.079,00	57.899.562.515,00	4.015.142.867,26	7,45
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**	5.891.842.000,00	22.365.807.632,70	24.639.604.672,04	52.897.254.304,74	7.720.893.991,00	23.381.709.198,00	26.026.757.079,00	57.129.360.268,00	4.232.105.963,26	8,00
1.01 . 1.01.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	0,00	4.568.807.600,00	63.700.000,00	4.632.507.600,00	0,00	3.580.187.600,00	35.600.000,00	3.615.787.600,00	(1.016.720.000,00)	(21,95)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	11.280.000,00	116,05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0,00	160.280.000,00	0,00	160.280.000,00	0,00	150.620.000,00	0,00	150.620.000,00	(9.660.000,00)	(6,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	80.000.000,00	800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	46.019.000,00	0,00	46.019.000,00	0,00	126.019.000,00	0,00	126.019.000,00	80.000.000,00	173,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0,00	285.347.600,00	0,00	285.347.600,00	0,00	278.507.600,00	0,00	278.507.600,00	(6.840.000,00)	(2,40)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	7.500.000,00	57.500.000,00	27.500.000,00	91,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	(20.600.000,00)	(42,30)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0,00	136.661.000,00	0,00	136.661.000,00	0,00	185.161.000,00	0,00	185.161.000,00	48.500.000,00	35,49
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	(200.000.000,00)	(61,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Pelaksanaan Hari Besar Islam dan Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	0,00	3.503.300.000,00	0,00	3.503.300.000,00	0,00	2.498.900.000,00	0,00	2.498.900.000,00	(1.004.400.000,00)	(28,67)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	0,00	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	17.500.000,00	233,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33	Pelaksanaan Peringatan Hardikda	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35	Pelaksanaan Peringatan Hardiknas	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 02	***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	0,00	76.389.600,00	16.565.160.094,00	16.741.549.694,00	1.422.972.000,00	56.472.400,00	15.934.647.069,00	17.414.091.469,00	672.541.775,00	4,02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	76.389.600,00	0,00	76.389.600,00	0,00	33.572.400,00	0,00	33.572.400,00	(42.817.200,00)	(56,05)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 50	Perencanaan Kegiatan OTSUS/DAK	0,00	0,00	487.652.050,00	487.652.050,00	0,00	0,00	243.826.025,00	243.826.025,00	(243.826.025,00)	(50,00)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 55	Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	0,00	0,00	9.805.143.044,00	9.805.143.044,00	1.422.972.000,00	22.900.000,00	10.317.821.044,00	11.763.693.044,00	1.958.550.000,00	19,97
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	0,00	0,00	2.727.365.000,00	2.727.365.000,00	0,00	0,00	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	(999.365.000,00)	(36,64)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 71	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	2.415.000.000,00	2.415.000.000,00	0,00	0,00	2.415.000.000,00	2.415.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72	Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 73	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06	***Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan***	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 13	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan***	0,00	0,00	3.808.000.000,00	3.808.000.000,00	0,00	0,00	4.008.000.000,00	4.008.000.000,00	200.000.000,00	5,25
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	3.808.000.000,00	3.808.000.000,00	0,00	0,00	4.008.000.000,00	4.008.000.000,00	200.000.000,00	5,25
1.01 . 1.01.01 . 15	***Program Pendidikan Anak Usia Dini***	7.500.000,00	83.198.000,00	0,00	90.698.000,00	7.500.000,00	83.198.000,00	0,00	90.698.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74	Apresiasi Peserta Didik PAUD Dikmas	7.500.000,00	83.198.000,00	0,00	90.698.000,00	7.500.000,00	83.198.000,00	0,00	90.698.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16	***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun***	29.000.000,00	680.928.000,00	0,00	709.928.000,00	8.000.000,00	376.860.000,00	0,00	384.860.000,00	(325.068.000,00)	(45,79)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64	Penyedlaan Operasional Sekolah	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	8.000.000,00	150.376.000,00	0,00	158.376.000,00	8.000.000,00	150.376.000,00	0,00	158.376.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	8.000.000,00	120.300.000,00	0,00	128.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(128.300.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) SMP	8.000.000,00	80.508.000,00	0,00	88.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.508.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) SD	5.000.000,00	103.260.000,00	0,00	108.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.260.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	MTQ pelajar se kabupaten Nagan Raya	0,00	111.484.000,00	0,00	111.484.000,00	0,00	111.484.000,00	0,00	111.484.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	(5.080.000,00)	(74,71)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	0,00	63.760.000,00	0,00	63.760.000,00	0,00	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	(33.460.000,00)	(52,48)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	0,00	410.000.000,00	0,00	410.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	(145.000.000,00)	(35,37)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	0,00	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	(17.700.000,00)	(38,23)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 28	Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	2.500.000,00	8.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(7.500.000,00)	(71,43)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 30	Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 47	Penyusunan e-Formasi Kabupaten Nagan Raya	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	800.000,00	8,00
4.05 . 4.05.01 . 02	***Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur***	0,00	33.700.000,00	28.000.000,00	61.700.000,00	0,00	19.100.000,00	28.000.000,00	47.100.000,00	(14.600.000,00)	(23,66)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	(12.600.000,00)	(47,19)
4.05 . 4.05.01 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	25.500.000,00	249.050.000,00	0,00	274.550.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00	(145.550.000,00)	(53,01)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 35	Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	19.000.000,00	209.000.000,00	0,00	228.000.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00	(99.000.000,00)	(43,42)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 42	Bimbingan Teknis Pemamfaatan Aplikasi e-Kinerja	6.500.000,00	40.050.000,00	0,00	46.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.550.000,00)	(100,00)
4.05 . 4.05.01 . 15	***Program Pendidikan Kedinasan***	27.700.000,00	1.653.500.000,00	0,00	1.681.200.000,00	5.895.000,00	1.645.000,00	0,00	7.540.000,00	(1.673.660.000,00)	(99,55)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07	Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	27.700.000,00	1.653.500.000,00	0,00	1.681.200.000,00	5.895.000,00	1.645.000,00	0,00	7.540.000,00	(1.673.660.000,00)	(99,55)
4.05 . 4.05.01 . 17	***Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur***	464.815.000,00	745.950.000,00	832.300.000,00	2.044.065.000,00	323.310.000,00	793.740.700,00	832.300.000,00	1.949.350.700,00	(94.714.300,00)	(4,63)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07	Seleksi Dan Penempatan PNS Untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	(6.150.000,00)	(50,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 15	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18	Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer	34.250.000,00	142.800.000,00	832.300.000,00	1.009.350.000,00	76.000.000,00	212.240.700,00	832.300.000,00	1.120.540.700,00	111.190.700,00	11,02
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Talent Pool	33.805.000,00	221.000.000,00	0,00	254.805.000,00	12.600.000,00	253.000.000,00	0,00	265.600.000,00	10.795.000,00	4,24
4.05 . 4.05.01 . 17 . 25	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural	6.000.000,00	138.500.000,00	0,00	144.500.000,00	6.000.000,00	138.500.000,00	0,00	144.500.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29	Pelaksanaan Sidang/Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepegawaian (BAPEJAKAT)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30	Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	(4.250.000,00)	(41,26)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	14.450.000,00	20.450.000,00	0,00	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.900.000,00)	(100,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32	Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS	17.700.000,00	4.200.000,00	0,00	21.900.000,00	17.700.000,00	4.200.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 50	Pengelolaan Website BKPSDM Kabupaten Kab.Nagan Raya	0,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	(10.800.000,00)	(25,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 59	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Karpeg, dan Karis/Karsu	48.810.000,00	70.000.000,00	0,00	118.810.000,00	48.810.000,00	70.000.000,00	0,00	118.810.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 65	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Online	0,00	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	(23.400.000,00)	(50,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 66	Pemberiaan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	127.200.000,00	0,00	0,00	127.200.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(67.200.000,00)	(52,83)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 67	Pemgembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi e-Kinerja	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	44.220.784.059,00	265.599.883.534,70	347.589.947.945,04	657.410.615.538,74	55.973.619.050,00	244.435.648.311,00	297.201.536.341,00	597.610.803.702,00	(59.799.811.836,74)	(9,10)

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Printed By SimDa

Lampiran V QANUN KAB. NAGAN RAYA
Nomor : 2 TAHUN 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5= 4 - 3	6
01			**PELAYANAN UMUM**	443.394.788.596,40	430.199.162.142,40	(13.195.626.454,00)	(2,98)
01	2	03	Pangan	3.832.247.000,00	8.592.119.000,00	4.759.872.000,00	124,21
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	4.650.964.764,00	4.010.249.855,00	(640.714.909,00)	(13,78)
01	2	14	Statistik	16.220.000,00	14.610.000,00	(1.610.000,00)	(9,93)
01	2	18	Kearsipan	191.415.000,00	49.100.000,00	(142.315.000,00)	(74,35)
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	108.013.090.773,00	93.970.998.737,00	(14.042.092.036,00)	(13,00)
01	4	02	Pengawasan	6.555.701.690,00	5.148.337.981,00	(1.407.363.709,00)	(21,47)
01	4	03	Perencanaan	15.480.715.806,00	11.072.153.370,00	(4.408.562.436,00)	(28,48)
01	4	04	Keuangan	296.906.163.208,40	302.238.719.611,40	5.332.556.403,00	1,80
01	4	05	Kepegawaian	7.748.270.355,00	5.102.873.588,00	(2.645.396.767,00)	(34,14)
03			**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	6.439.891.947,00	5.054.814.099,00	(1.385.077.848,00)	(21,51)
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6.439.891.947,00	5.054.814.099,00	(1.385.077.848,00)	(21,51)
04			**EKONOMI**	72.796.238.007,00	62.447.443.769,00	(10.348.794.238,00)	(14,22)
04	2	01	Tenaga Kerja	3.244.921.676,00	3.155.414.255,00	(89.507.421,00)	(2,76)
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.632.825.587,00	4.650.497.109,00	(1.982.328.478,00)	(29,89)
04	2	09	Perhubungan	8.377.464.269,00	4.483.152.703,00	(3.894.311.566,00)	(46,49)
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.652.331.603,00	5.011.821.823,00	(2.640.509.780,00)	(34,51)
04	2	12	Penanaman Modal	3.364.121.638,00	2.933.949.883,00	(430.171.755,00)	(12,79)
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	10.826.846.579,00	10.716.045.504,00	(110.801.075,00)	(1,02)
04	3	03	Pertanian	25.975.364.487,00	25.544.728.096,00	(430.636.391,00)	(1,66)
04	3	04	Kehutanan	4.095.935.312,00	3.104.845.040,00	(991.090.272,00)	(24,20)
04	3	05	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.221.496.160,00	1.255.558.660,00	34.062.500,00	2,79
04	3	06	Perdagangan	418.020.000,00	1.252.475.000,00	834.455.000,00	199,62
04	3	07	Perindustrian	611.710.696,00	306.130.696,00	(305.580.000,00)	(49,95)
04	3	08	Transmigrasi	375.200.000,00	32.825.000,00	(342.375.000,00)	(91,25)
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	13.078.981.430,00	11.105.980.553,00	(1.973.000.877,00)	(15,09)
05	2	04	Pertanahan	0,00	91.394.070,00	91.394.070,00	0,00
05	2	05	Lingkungan Hidup	13.078.981.430,00	11.014.586.483,00	(2.064.394.947,00)	(15,78)

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5= 4 - 3	6
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	232.607.693.324,00	176.764.553.905,00	(55.843.139.419,00)	(24,01)
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.067.028.709,00	140.158.099.951,00	(53.908.928.758,00)	(27,78)
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38.540.664.615,00	36.606.453.954,00	(1.934.210.661,00)	(5,02)
07			**KESEHATAN**	223.786.752.208,00	258.171.701.303,00	34.384.949.095,00	15,37
07	1	02	Kesehatan	218.440.313.208,00	252.886.769.303,00	34.446.456.095,00	15,77
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.346.439.000,00	5.284.932.000,00	(61.507.000,00)	(1,15)
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	6.133.341.278,00	5.480.804.747,00	(652.536.531,00)	(10,64)
08	2	16	Kebudayaan	3.726.231.278,00	3.219.156.747,00	(507.074.531,00)	(13,61)
08	3	02	Pariwisata	2.407.110.000,00	2.261.648.000,00	(145.462.000,00)	(6,04)
10			**PENDIDIKAN**	254.842.324.327,74	246.168.353.411,00	(8.673.970.916,74)	(3,40)
10	1	01	Pendidikan	240.925.146.601,74	236.090.489.664,00	(4.834.656.937,74)	(2,01)
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	10.944.515.224,00	7.647.834.924,00	(3.296.680.300,00)	(30,12)
10	2	17	Perpustakaan	2.972.662.502,00	2.430.028.823,00	(542.633.679,00)	(18,25)
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	40.401.932.481,00	31.645.327.745,00	(8.756.604.736,00)	(21,67)
11	1	06	Sosial	35.705.554.094,00	27.705.388.589,00	(8.000.165.505,00)	(22,41)
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	283.210.000,00	108.250.550,00	(174.959.450,00)	(61,78)
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.413.168.387,00	3.831.688.606,00	(581.479.781,00)	(13,18)
				1.293.481.943.599,14	1.227.038.141.674,40	(66.443.801.924,74)	(5,14)

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM